

KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAJENE

Ammar Asyraf¹, Muh. Ihsan Said², Mustari³
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.

E-mail : Ammarasyraf@gmail.com

AMMAR ASYRAF, 2019. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene. Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pembimbing I: Muh Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si. dan Pembimbing II: Dr. Mustari, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dengan populasi dan sampel penelitian adalah data-data tentang penerimaan Retribusi Daerah dan

LATAR BELAKANG

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai Negara Kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonomi diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. (Josef, 1998:9).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalan dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575)

Menurut Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan

Pendapatan Asli Daerah periode 2009-2018. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode regresi linear sederhana.

Hasil penelitian di kabupaten Majene menunjukkan bahwa hubungan antara Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang merujuk pada nilai koefisien korelasi (r) = 0,640 yang berarti bahwa mempunyai hubungan korelasi yang positif. Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistik t menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci : Retribusi Daerah,
Pendapatan Asli Daerah**

baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia baik pula.

Untuk itu harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut reaktifitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ketahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (siahn, 2001:34).

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung mendapatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu dalam pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber retribusi tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun realita yang terjadi di kabupaten Majene terkait Penerimaan Retribusi Daerah masih perlu di tingkatkan lagi. Dimana target realisasi yang terjadi dalam penerimaan retribusi daerah kabupaten Majene dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2009-2018

Tahun	Target Penerimaan Retribusi DAerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Presentase (%)
2009	Rp3.104.250.000,-	Rp.1.992.881.002,-	64,20%
2010	Rp4.693.075.432,-	Rp. 2.245.239.021,-	47,84%
2011	Rp4.292.157.032,-	Rp.2.261.629.035,-	85,10%
2012	Rp.11.907.069.264,-	Rp.6.987.523.381,-	58,68%
2013	Rp.16.358.493.453,-	Rp.13.304.296.298,-	81,08%
2014	Rp.49.319.772.299,-	Rp.43.910.442.192,-	89,03%
2015	Rp. 13.151.511.500,-	Rp.12.086.249.408,-	91,90%
2016	Rp. 13.636.174.600,-	Rp.12.192.213.718,-	89,41%
2017	Rp. 15.366.796.590,-	Rp.13.489.672.392,-	87,78%
2018	Rp. 16.433.115.000,-	Rp.11.972.151.215,-	70,71%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene selama 5 Tahun dari 2014 sampai 2018

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Majene perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Retribusi Daerah, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan Retribusi sehingga Retribusi Daerah memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene”**

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul ini yaitu pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka variabel yang digunakan adalah hasil pungutan

retribusi sebagai variabel bebas dan hasil pendapatan asli daerah di kabupaten majene sebagai variabel terikat dengan desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif, dengan berusaha menggunakan data dan informasi adalah yang dibutuhkan tentang pungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Majene selama lima tahun anggaran, selanjutnya data yang dikumpulkan itu dianalisis secara dekskriptif.

Untuk Menghindari terjadinya interprestasi yang berlainan, dalam menafsirkan variabel yang diteliti, maka variabel penelitian perlu dioperasionalkan. Adapun defenisi operasional variabel-variabel yang akan diteliti adalah (1) retribusi adalah pungutan sejumlah uang yang diterima dari para retribusi yang kemudian dinilai dengan rupiah; (2) pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang merupakan hasil usaha sendiri dan dikelola oleh pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Deerah sejak Kabupaten Majene Dari tahun 2009-2018 dan sampel pada penelitian ini yakni laporan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Majene Dari tahun 2009-2018 sebanyak 10 tahun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara serta analisis data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahapan pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan generalisasi, dengan menggunakan statistik penelitian. Statistik merupakan catatan angka-angka (bilangan), perangkaan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberikan informasi.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik dengan menggunakan Regresi Linear Sederhana. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan uji t (Uji Parsial). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jumlah pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.⁷ Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0.05 ($\alpha=5\%$). Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel keputusan menerima dan menolak H_0 adalah (1) jika nilai t hitung > nilai t tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a ; (2) jika nilai t hitung < nilai t tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a .

Analisis Korelasi Product Moment digunakan untuk menguji pengaruh variabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Majene .Untuk keperluan ini, digunakan rumus korelasi analisis Product Moment oleh Sugiyono (2010:212) yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2 y^2)}}$$

Di mana:

- r_{xy} : Koefisien korelasi
- x : Nilai Variabel x
- y : Nilai Variabel y

Selanjutnya pengujian koefisien korelasi dengan menguji hipotesis, yaitu:

$H_0 : \rho = 0$ lawan $H_1 : \rho \neq 0$.

Kriteria pengujian adalah terdapat hubungan jika nilai r hitung lebih besar nilai r table pada sampel (N) tertentu pada taraf signifikan 0,05 demikian pula sebaliknya. Untuk mengetahui besarnya hubungan kedua variabel, maka di gunakan t interpretasi dari Sugiyono (2010:214) sebagai berikut:

Tabel 3.1: Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

Sumber (Sugiyono,2010)

Sedangkan derajat kesalahan atau derajat bebas (db) untuk menguji F tersebut pada signifikan (α) = 0,05 persen.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa model dalam menerangkan variabel terikat jika R^2 semakin besar (mendekati satu). Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas. Retribusi Daerah (X) adalah besar terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

$$D = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

D = Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 20 38' 45" – 30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" - 1190 4' 45" Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah Kabupaten Majene 947.84 Km² dan didiami sebanyak 151.107 jiwa. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah pada setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas tempat atau jasa yang telah disediakan oleh pihak pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pungutan retribusi daerah dalam wilayah daerahnya atas peraturan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan demikian pula di Kabupaten Majene. Menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya "Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah" yaitu ciri utama yang menunjukkan daerah yang kaya yaitu terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Retribusi juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah.

Dilihat dari jumlah yang dicapai, Retribusi Daerah Kabupaten Majene dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsih yang besar untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene. Dari Hasil analisa Regresi Linear sederhana, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikansi 0,46. Hal tersebut maka Retribusi Daerah signifikan berpengaruh positif terhadap pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,01 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif 1,119 terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Annisya Rahmadani (2018) bahwa “penerimaan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap pendapatan asli Daerah”.

Dilihat dari kecenderungannya, retribusi yang diolah cenderung labil dimana terjadi kenaikan dan penurunan jumlah yang drastis, jumlah bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pada waktu-waktu tertentu, seperti musim liburan, menjelang hari raya atau hari-hari besar lain. Pada waktu-waktu tertentu jumlah pendapatan Retribusi bisa meningkat dan pada bulan tertentu akan turun. Inilah yang menyebabkan kecenderungan Retribusi labil. Meskipun masih terdapat komponen pendapatan Asli Daerah Lainnya namun retribusi daerah memberi sumbangsih yang besar dan berpengaruh terhadap total pendapatan Asli Daerah kabupaten Majene.

Dalam proses pelaksanaan penarikan Retribusi, para pegawai penarikan Retribusi sering kali mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh para pegawai dalam menarik pajak daerah adalah:

1. Apabila tarif pembayaran dinaikkan akan terbentur dengan SKPD (Surat Keterangan pajak Daerah), juga akan memberatkan masyarakat yang akan membayar retribusi daerah yang ingin menaikkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah tetapi tidak memberatkan masyarakat.
2. Kurangnya tenaga penarikan retribusi daerah menjadi hambatan untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah. Bidang pendapatan dibagi menjadi 3 bagian:
 - a. Kasi retribusi dan lain-lain
 - b. Kasi dana perimbangan, pajak hotel, pajak parkir
 - c. Kasi perencanaan dan pelaporan

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi menjadi hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah. Masyarakat kurang patuh dalam membayar retribusi daerah karena menganggap retribusi daerah memberatkan mereka. Pegawai yang melakukan penarikan retribusi juga mengeluhkan sulitnya menarik retribusi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena peranan retribusi daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dari analisis regresi yang telah dilakukan mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene.
3. Retribusi pemerintah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten majene tergolong dalam sumber pendapatan daerah yang cukup dapat berpengaruh bagi perkembangan dan pelaksanaan otonomi daerah (otoda) dimana tiap daerah harus mampu mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. adalah 75,64 dan dinyatakan berhasil. Adapun perbandingan skor rentangan yang diperoleh antara siklus I dan siklus II yaitu 14,76.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Bambang, Prakosa Kesit. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, UII Press

Basuki.,S.H. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Bohari.,H. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali.

Darwin, Drs. 2010. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta :Mitra Wacana Media

- Diandra, Gabriela. 2011. *“Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)Provinsi DKI Jakarta”*.Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta.Universitas Indonesia
- Kaho, Josef Riwu. 1988. *ProspekOtonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Garafindo.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 *tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah*
- Kusuma, Tirta. 2012. *“Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang”*
- Kusuma, M. K. A. A., dan Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pad sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 5(3). 574-585.
- Mentayani,I, Rusmanto, dan Mirda, L. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah pada kabupaten Dan Kota Kalimantan Selatan. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dn bisnis 1* (7). 30-43
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajakdan Retribusi Daerah* Jakarta : PT Raja Garafindo.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jogjakarta:
- Simangunsong, Anton. 2015. *Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Povinsi Kalimantan Barat (periode 2009-2014)*.
- Solihin, Dadang, Drs.,M.A.,dan Barata Kusuma, Dedy.,S. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia

Suparmoko, M (2002) *Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah.*

Yogyakarta: Andi Offset

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*